

ANALISIS PRO POOR DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG

ANALYSIS OF PRO POOR IN THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF PINRANG REGENCY

Julfikram HI. Idris¹⁾, Arham²⁾, Hasdiana³⁾

Email : julfikram97@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Parepare

Abstract

JULFIKRAM HI. IDRIS, 20 24 . Research title Propoor Analysis in the Pinrang Regency APBD, Supervisor I Mr. Dr. Ahram, SE., M.Ak and Supervisor II Mrs Hasdiana , SE., M. Ak . in the Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Parepare. The aim to be achieved in this research is to analyze the effectiveness of managing the Pinrang Regency Poverty Budget for 20 17 - 20 21 . The poverty budget has an effectiveness level of 57,314% in the ineffective category. In 2017, poverty budget management was 21.68% in the ineffective category. In 2018, poverty budget management was 27.74% in the ineffective category. In 2019, poverty budget management was 84.95% in the quite effective category. In 2020, poverty budget management was 55.25% in the ineffective category. In 2021, poverty budget management will be 96.95% effective . The data collection techniques used in this research are interviews and documentation. The data analysis technique for this research uses effectiveness ratio analysis. The research results that can be concluded from this research are that poverty budget management in Pinrang Regency has experienced fluctuations. So the budget is different every year. This results in an average effectiveness ratio from 20 17 - 20 21 of 57 . 314 % in the ineffective category.

Keywords: Effectiveness, Propoor

Abstrak

JULFIKRAM HI. IDRIS, 2024. Judul penelitian Analisis Propoor Dalam APBD Kabupaten Pinrang, Pembimbing I Bapak Dr. Ahram, SE., M.Ak dan Pembimbing II Ibu Hasdiana, SE., M.Ak. pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Menganalisis Eektivitas pengelolaan Anggaran Kemiskinan Kabupaten Pinrang Tahun 2017-2021. Anggaran kemiskinan memiliki tingkat efektivitas sebesar 57.314 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2017 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 21.68 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2018 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 27.74 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2019 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 84.95 % dengan kategori cukup efektif. Pada tahun 2020 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 55.25 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2021 pengelolaan anggaran kemiskinan 96.95 % kategori efektif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis rasio efektivitas. Hasil Penelitian yang dapat disimpulkan dari Penelitian ini adalah Pengelolaan anggaran kemiskinan di kabupaten pinrang mengalami fluktuasi. Sehingga anggaran tiap tahunnya berbeda. Hal ini mengakibatkan rasio efektivitas rata-rata dari tahun 2017-2021 sebesar 57.314 % dengan kategori tidak efektif.

Kata kunci: Efektivitas, Propoor

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah lama yang pada umumnya dihadapi hampir disemua negara-negara berkembang terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia Kemiskinan seharusnya menjadi masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Data jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan menunjukkan angkayang semakin tinggi.

Hamid (2008) menyebutkan bahwa saat ini pengertian kemiskinan bukan hanya didasarkan pada aspek pendapatan dan konsumsi saja, namun mencakup aspek ketergantungan, harga diri,

pendapatan, kesejahteraan dan sebagainya. Menurut SMERU melihat Research Institute, kemiskinan didefinisikan dengan melihat berbagai dimensi yaitu (Hamid, 2008):

1. Ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan pokok (sandang pangan dan papan).
2. Tidak mempunyai akses terhadap kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi.
3. Tidak mempunyai jaminan atas masa depan yang disebabkan tidak adanya investasi pendidikan dan keluarga.
4. Rentan terhadap masalah yang bersifat individual maupun missal
5. Mempunyai kualitas sumber daya manusia yang rendah dan sumber daya alam yang terbatas.
6. Tidak pernah ikut dalam kegiatan sosial di masyarakat
7. Tidak mempunyai akses terhadap kesempatan kerja dan pekerjaan yang mapan
8. Tidak mampu berusaha karena mempunyai kelainan fisik maupun mental

Ketidakmampuan sosial seperti anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok minoritas dan terpencil.

Sejak terjadinya krisis multi dimensional yang melanda Indonesia 1997 yang ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto, jumlah penduduk miskin melonjak tajam. Bantuan IMF turun pada Oktober 1997 dalam bentuk pinjaman uang terbukti belum bisa segera memperbaiki Stabilitas ekonomi yang akhirnya menjadi krisis yang semakin lama berkembang menjadi krisis yang berkepanjangan Krisis yang berkepanjangan itu semata-mata bukan karena masalah ekonomi global sajatapi juga karena kegagalan dalam mengelola pembangunan. Dimana kebijakan pembangunan lebih mementingkan aspek pertumbuhan daripada aspek pemerataan. Sebagai contoh, pembangunan secara terus menerus hanya dilakukan dikawasan Pulau Jawa dan Bali sedangkan masih banyak daerah terpencil di Indonesia bagian timuryang masih diabaikan.

Berbagai program dan kebijakan yang telah dibuat pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Penanggulangan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi, Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sebagainya sampai saat ini belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Semua terjadi disebabkan karena program hanya menitik beratkan pada salah satu dimensi dari gejala kemiskinan seperti politik, ekonomi, sosial yang tidak menyentuh sampai akar penyebab kemiskinan, misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT), tetapi kurang efektif karena banyak yang salah sasaran, bahkan membuka peluang penyalahgunaan dana hingga berakibat konflik sosial di beberapa wilayah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) Secara umum menjelaskan bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan fiskal tahun 2011 yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tetap melanjutkan kebijakan pro growth, pro job dan pro poor. Dengan demikian tersirat bahwa prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin menjadi salah satu program nasional, artinya tingkat kemiskinan diharapkan terus mengalami penurunan.

Target pencapaian program penanggulangan kemiskinan dapat diukur berdasarkan skala waktu yaitu target jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Target jangka pendek mengacu pada RKPD yang ditetapkan setiap tahun. Sedangkan target jangka menengah mengacu pada perencanaan lima tahunan yang ditetapkan dalam RPJM Nasional serta RPJM Daerah. Target jangka panjang mengacu pada perencanaan pembangunan 25 tahunan yang ditetapkan dalam RPJP Nasional dan daerah. artinya penanganan persoalan kemiskinan sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Program pengentasan kemiskinan daerah sebagai salah satu indikator penting kinerja pemerintah daerah di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan menjadi pintu untuk mengatasi masalah ini. Sehingga perlu untuk menelaah kinerja pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan uraian diatas maka dipandang perlu untuk menjabarkan data kemiskinan di kabupaten pinrang sebagai berikut:

Tabel 1.1

Kategori	Kategori Kemiskinan				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kemiskinan					
Garis Kemiskinan	256.055	280.746	294.349	338.731	345.892

Persentase Penduduk Miskin (PO)	8.46	8.81	8.46	8.86	8.81
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.62	1.16	1.54	1.27	1.77
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	0.44	0.26	0.40	0.34	0.50

Sumber: BPS Pinrang 2020 (Data diolah)

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang, garis kemiskinan dari tahun 2021 – 2023 mengalami peningkatan. Menelaah data tersebut, pemerintah dalam hal ini tidak mampu menekan atau meminimalisasi garis kemiskinan. Berdasarkan latar belakang yang ditemukan oleh peneliti memutuskan untuk mengangkat judul "Analisis pro poor dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Pinrang

METODE PENELITIAN

Deskriptif Kualitatif

Menurut Sugiyono, (2017), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah yaitu:

Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menelusuri tema, gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya membuat dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian naratif. data kualitatif disajikan dalam bentuk teks Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus.

Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan foto pribadi, dokumen resmi, gambar, dokumen sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Rasio Efektivitas = (Realisasi anggaran pengentasan kemiskinan)/(Target anggaran pengentasan kemiskinan) x 100

Mahmudi (2010:143) dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

Tabel 2.1

Presentase Kinerja Pemerintah	Kriteria
60	Tidak efektif
60%-80%	Kurang efektif
80%-90%	Cukup efektif
90%-100%	Efektif
100%	Sangat efektif

Sumber: Mahmudi (2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian berupa data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang selaku instansi yang menangani pengentasan kemiskinan.

a. Anggaran Kemiskinan

Adapun anggaran kemiskinan pada tahun 2021-2023 di Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

PROGRAM	TAHUN	ANGGARAN
		(Rp)
BANTUAN SOSIAL	2017	650.000.000
	2018	500.000.000
	2019	3.125.000.000
	2020	329.700.000
	2021	2.138.000.000
TOTAL		6.742.000.000

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel Anggaran Kemiskinan menunjukkan bahwa pada tahun 2017 anggaran kemiskinan sebesar Rp.650.000.000 dan pada tahun 2018 anggaran kemiskinan sebesar Rp.500.000.000 serta pada tahun 2019 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 3.125.000.000 pada tahun 2020 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 329.700.000 pada tahun 2021 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 2.138.000.000. Jadi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dari tahun 2017-2021 sebanyak Rp.6.742.000.000

b. Realisasi Anggaran Kemiskinan

Adapun Realisasi Anggaran Kemiskinan pada tahun 2017-2021 di Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

PROGRAM	TAHUN	REALISASI ANGGARAN
		(Rp)
BANTUAN SOSIAL	2017	140.950.000
	2018	138.700.000
	2019	2.654.700.000
	2020	182.150.000
	2021	2.060.000.000
TOTAL		5.176.500.000

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel Realisasi Anggaran Kemiskinan menunjukkan bahwa pada tahun 2017 realisasi anggaran kemiskinan sebesar Rp.140.950.000 pada tahun 2018 anggaran kemiskinan sebesar Rp.138.700.000 pada tahun 2019 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 2.654.700.000 pada tahun 2020 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 182.150.000 serta pada tahun 2021 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 2.060.000.000 Jadi realisasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan dari tahun 2017-2021 sebesar Rp. 5.176.500.000

c. Rekapitulasi anggaran dan realisasi

Adapun rekapitulasi anggaran dan realisasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kabupaten pinrang untuk anggaran menunjukkan bahwa dari tahun 2017-2021 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 6.742.000.000 dan realisasi anggaran kemiskinan sebesar Rp. 5.176.500.000

d. Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kemiskinan

Berangkat dari tujuan penelitian dalam menjawab rumusan masalah penelitian, maka analisis yang akan digunakan adalah efektivitas pengelolaan Anggaran Kemiskinan pada Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari APBD Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang, maka adapun perhitungan pengelolaan Anggaran Kemiskinan adalah sebagai berikut (Mahmudii, 2010):

Realisasi Anggaran Kemiskinan

$$\text{RASIO EVEKTIVITAS} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Kemiskinan}}{\text{Anggaran Kemiskinan}} \times 100\%$$

Untuk perhitungan efektivitas pengelolaan Anggaran Kemiskinan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan rumus tersebut sebagai berikut :

1) Efektifitas Pengelolaan Anggaran Kemiskinan Tahun 2017

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Rp.140.950.000}}{\text{Rp.650.000.000}} \times 100\% = 21.68\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektifitas pengelolaan dan penyaluran bansos Pada tahun 2017 sebesar 21.68 % dengan kategori tidak efektif.

2) Efektifitas Pengelolaan Anggaran Kemiskinan Tahun 2018

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Rp.138.700.000}}{\text{Rp.500.700.000}} \times 100\% = 27.74\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas pengelolaan Anggaran Kemiskinan diatas bahwa Pada tahun 2018 sebesar 27.74% dengan kategori tidak efektif.

3) Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kemiskinan Tahun 2019

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Rp.2.654.700.000}}{\text{Rp.3.125.000.000}} \times 100\% = 84.95\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas pengelolaan dan penyaluran anggaran kemiskinan diatas bahwa Pada tahun 2019 sebesar 84.95% dengan kategori cukup efektif.

4) Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kemiskinan Tahun 2020

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Rp.182.150.000}}{\text{Rp.329.700.000}} \times 100\% = 55.25\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas pengelolaan dan penyaluran anggaran kemiskinan diatas bahwa Pada tahun 2020 sebesar 55.24% dengan kategori kurang efektif.

5) Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kemiskinan Tahun 2021

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Rp.2.060.000.000}}{\text{Rp.2.138.000.000}} \times 100\% = 96.35\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas pengelolaan dan penyaluran anggaran kemiskinan diatas bahwa Pada tahun 2021 sebesar 96.35% dengan kategori efektif.

e. Tingkat Efektivitas Anggaran Kemiskinan Kabupaten Pinrang

Adapun tingkat efektivitas anggaran kemiskinan dan realisasi anggaran yang telah dihitung sebagai berikut:

Tabel 4.4

Tahun	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Tingkat Efektifitas (%)	Keterangan
2017	140.950.000	650.000.000	21.68	TidakEfektif
2018	138.700.000	500.000.000	27.74	TidakEfektif
2019	2.654.700.000	3.125.000.000	84.95	Cukup Efektif
2020	182.150.000	329.700.000	55.25	TidakEfektif
2021	2.060.000.000	2.138.000.000	96.95	efektif
Rata-Rata			57.314	Tidak Efektif

Sumber : Data Diolah (2024)

B. Pembahasan

. Anggaran Kemiskinan

Anggaran kemiskinan pada tahun 2017-2021 fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2017 anggaran kemiskinan sebesar Rp.650.000.000 . Pada Tahun 2018 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 5000.000.000 yang tentu berbeda pada tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2019 anggaran kemiskinan sebesar Rp.3.125.000.000 , pada tahun 2020 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 329.700.000 , pada tahun 2021 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 2.138.000.000 hal ini menunjukkan adanya kenaikan anggaran yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dari hasil analisis dan wawancara kepada beberapa staf menerangkan bahwa Hal ini disebabkan karena kenaikan pajak tiap tahunnya. Pajak yang dimaksud adalah pajak pertambahan nilai barang yang disalurkan dan harga barang yang meningkat karena bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa barang sehingga dapat meningkatkan jumlah anggaran yang digunakan.

b. Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kemiskinan

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata rasio efektivitas dari tahun 2017-2021 anggaran kemiskinan memiliki tingkat efektivitas sebesar 57.314 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2017 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 21.68 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2018 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 27.74 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2019 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 84.95 % dengan kategori cukup efektif. Pada tahun 2020 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 55,25 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2021 pengelolaan anggaran kemiskinan 96.95 % kategori efektif

Dari tahun ke tahun efektifitas pengelolaan dan penyaluran anggaran kemiskinan mengalami fluktuasi. Dengan ini pihak Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang dalam mengelola dan menyalurkan anggaran kemiskinan kepada masyarakat belum mengalami kemajuan. dari hasil kelima tahun tersebut bahwa Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran kemiskinan dikategorikan Tidak Efektif. Pada tahun 2017-2021 semua program Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan sepenuhnya. Ini menjadi salah satu penilaian bagi peneliti bahwa Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang dalam mengelola dan menyalurkn Anggaran Kemiskinan kepada masyarakat sudah dapat dikategorikan Tidak Efektif.

Dari hasil wawancara dengan Staf Bidang Keuangan BAPPEDA Kabupaten Pinrang mengemukakan bahwa terjadinya fluktuasi anggaran kemiskinan di Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah: Perubahan dalam kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat mempengaruhi alokasi anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan. Kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, dan peraturan baru sering kali memengaruhi besaran anggaran yang dialokasikan. Selain dari pada itu ada masyarakat yang mengaku miskin lantaran merasa cukup enak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah yang dibingkai dalam Program Keluarga Harapan (PKH), ini berpengaruh dengan penurunan angka kemiskinan.
2. Pendapatan Daerah: Fluktuasi dalam pendapatan asli daerah (PAD) dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menganggarkan dana untuk program kemiskinan. Jika PAD menurun, alokasi anggaran untuk program sosial mungkin juga akan berkurang.
3. Efektivitas Program dan Kebutuhan Aktual: Evaluasi terhadap efektivitas program-program sebelumnya dapat menyebabkan perubahan dalam alokasi anggaran. Jika program tertentu terbukti tidak efektif, anggaran bisa dialihkan ke program lain yang dianggap lebih efektif. Selain itu, perubahan dalam kebutuhan masyarakat juga mempengaruhi alokasi anggaran.
4. Dukungan dari Pemerintah Pusat: Besarnya dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), juga berpengaruh terhadap anggaran kemiskinan. Fluktuasi dalam besaran transfer ini dapat menyebabkan perubahan dalam anggaran yang tersedia di tingkat kabupaten.
5. Perubahan Sosial dan Ekonomi: Perubahan dalam kondisi sosial dan ekonomi, seperti tingkat pengangguran, inflasi, dan harga komoditas, dapat mempengaruhi jumlah orang yang membutuhkan bantuan dan besarnya anggaran yang diperlukan.
6. Krisis Ekonomi dan Bencana Alam: Krisis ekonomi atau bencana alam dapat secara signifikan mempengaruhi anggaran kemiskinan. Misalnya, bencana alam dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan peningkatan jumlah orang yang membutuhkan bantuan, yang memerlukan penyesuaian anggaran.
7. Kapasitas Administratif dan Manajerial: Kapasitas administrasi dan manajerial pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan program pengentasan kemiskinan juga mempengaruhi fluktuasi

anggaran. Keterlambatan dalam pencairan dana, ketidakmampuan dalam merencanakan dan mengimplementasikan program, serta korupsi bisa menjadi faktor yang mengurangi efektivitas anggaran yang dialokasikan.

8. Belum adanya sistem informasi terpadu mengenai laporan kinerja dan proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

9. Keterbatasan dalam Pelaksanaan Program: Pembatasan mobilitas dan protokol kesehatan membuat distribusi bantuan sosial dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan menjadi lebih sulit karena adanya covid-19 dan membutuhkan biaya tambahan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata rasio efektivitas dari tahun 2021-2023 anggaran kemiskinan memiliki tingkat efektivitas sebesar 44.79 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2021 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 21.68 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2022 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 27.74 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2023 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 84.95 % dengan kategori cukup efektif.

Dari tahun ke tahun efektifitas pengelolaan dan penyaluran anggaran kemiskinan mengalami fluktuasi. Dengan ini pihak Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang dalam mengelola dan menyalurkan anggaran kemiskinan kepada masyarakat belum mengalami kemajuan. dari hasil ketiga tahun tersebut bahwa Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran kemiskinan dikategorikan Cukup Efektif. Pada tahun 2021-2023 semua program Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan sepenuhnya. Ini menjadi salah satu penilaian bagi peneliti bahwa Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang dalam mengelola dan menyalurkan Anggaran Kemiskinan kepada masyarakat sudah dapat dikategorikan Cukup Efektif.

Saran

Adapun saran-saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu lebih akurasi dalam pengambilan data penduduk miskin agar dana pengentasan kemiskinan dalam anggaran daerah dapat teralokasikan dengan tepat sasaran dan merata kepada seluruh penduduk miskin Kabupaten Pinrang.
2. Dalam menyusun anggaran pengentasan kemiskinan, Pemerintah perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat selain dari pada itu Pemerintah harus meningkatkan keterbukaan atau ada proses sosialisasi kegiatan-kegiatan yang diprogramkan pemerintah. Kemudian pemerintah juga perlu kerja maksimal dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tersebut agar anggaran kemiskinan dapat teralisasi dengan efektif.
3. Perlu kajian aspek sosial dalam memahami realitas penduduk miskin dan menghindari kepentingan politik dalam praktek penganggaran penduduk miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Debby ch. Rotinsulu, avriano r. Ten da, luciana m. Leonufina (2010) Analisis Dampak Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran Di Sulawesi Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol. 18, No. 3 (2016)
- Dewi Irma Septiyani Paulus, Rosalina A.M. Koleangan, Daisy S.M.Engka (2017) Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah Di Kota Bitung. Jurnal Pembangunan Ekonomidan Keuangan Daerah. Vol. 18, No. 3 (2016)
- Della, Juliani (2019). Pengaruh Dana Transfer dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Diploma. Universitas Andalas
- Garrison, Noreen, dan Brewer. (2007). Akuntansi Manajerial. Edisi 11. Diterjemahkan oleh Nuri Hinduan dan Edward Tanujaya. Salemba Empat. Jakarta
- Mc. Khuzaironi (2015). Pengaruh Kebjaksanaan APBD Dan Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro: Semarang
- Suroso. (2006), Kajian Kapasitas Sungai Logawa dalam Menampung Debit Banjir Menggunakan Program HEC-RAS. Jurusan Teknik Si Universitas Soedirman Purwokerto,.
- Sinurat, Riki Kurniawati, 2019, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Medan. Skripsi. Universitas HKBP Nommensen.
- Mardiasmo. (2009), Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi. Jurnal Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa periode 2006-2010).

Munandar, H., Kurniawan, F. Dan Santoso, P. (2007), Mencari Hubungan antara Kebijakan Moneter dengan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan. Kajian Menggunakan Data Regional Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.

Riskawati, dan Abdul. (2013), Faktor Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung). <http://www.academia.edu/> diakses dan diunduh pada 15 September 2017.

<https://pinrangkab.bps.go.id/pressrelease/2023/12/20/31/profil-kemiskinan-kabupaten-pinrang-maret-2023.html>

Hasil pemeriksaan BPK-RI Pemkab Pinrang <https://pinrangkab.go.id/laporan-hasil-pemeriksaan-bpk-ri/>